

ALTHIEN J. PESURNAY

JALAN MENUJU KEADILAN

Sebuah Telaah Etika Politik
Mazhab Frankfurt Generasi II



PUSTAKA PELAJAR

JALAN MENUJU KEADILAN

Sebuah Telaah Etika Politik
Mazhab Frankfurt Generasi II

Althien J. Pesurnay

Cetakan I, 2021

PP.2021

PENERBIT PUSTAKA PELAJAR, Copyright © 2021

Desain Cover: Amaryllis Graphic House

Pemerhati Aksara: Heppy El Rais

Pemeriksa Aksara: Priyati

Penata Aksara: Amaryllis

Penerbit:

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: www.pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-623-236-214-7

x • ALTHIEN J. PESURNAY

BAB 3. KEADILAN DAN PROBLEMATIKA SOSIAL
INDONESIA KONTEMPORER
(SEBUAH REFLEKSI WARGANEGARA) — 106

Selintas pandang keadilan sosial — 106

Demokrasi dan Pluralisme — 140

Demokrasi atau Populisme? — 162

Populisme Kanan dan Politik Identitas
di Indonesia — 173

Kesimpulan — 181

DAFTAR PUSTAKA — 194

INDEKS — 201

TENTANG PENULIS — 205

yakni lewat jalan politik pengkuan dan kebijakan redistribusi. Redistribusi dalam perwujudannya tidak lain adalah praktik politik ekonomi. Kebijakan redistribusi menyangkut pola hubungan produksi. Ranah kebijakan publik redistribusi diimplementasikan secara konkret melalui program kesejahteraan seperti, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. kebijakan kesejahteraan bertujuan meningkatkan indeks pengembangan manusia (*Human Index Development*). Kebijakan redistribusi mempertimbangan detail dari variabel keadilan. Secara umum tujuan redistribusi adalah untuk menanggulangi ketidakadilan dalam struktur ekonomi termasuk eksploitasi, marjinalisasi ekonomi, deprivasi ekonomi atau kurangnya sumber daya⁵⁵. Tujuan dan maksud utama redistribusi adalah untuk mencapai restrukturisasi ekonomi dan mengurangi perbedaan antar kelompok dengan cara membuka peluang bagitiap kelompok dari beragam budaya.

3.3. DEMOKRASI ATAU POPULISME?

Pada satu dekade terakhir istilah populisme kembali muncul dan meruak di berbagai media internasional dan nasional. Populisme menjadi fenomena sosial dan politik akhir-akhir ini. Fenomena populisme terasa di hampir semua benua dan sangat kental nuansanya dalam konteks demokrasi di Indonesia sendiri. Populisme sebagai satu *isme* atau terminologi ilmu sosial mulai dikaji kembali seiring dengan semakin maraknya fenomena ini. Sesuai etimologinya kata populisme sendiri berasal dari bahasa latin *populus* yang dapat diartikan ke bahasa Indonesia sebagai rakyat. Populisme dalam kamus besar Cambridge dan Oxford berarti sebuah gagasan atau praktik yang bertujuan untuk

55. Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (Oxford: Oxford Press, 2002), 332.

menarik simpatik rakyat biasa. Pengambilan simpatik rakyat dilakukan cara memberikan serta memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat yang sering terabaikan oleh kelompok elite. Secara mendasar populisme berarti “kepercayaan bahwa kekuasaan demi orang biasa atau rakyat kecil”. Dengan kata lain rakyat kecil memiliki hak kontrol atas negara dan bertentangan dengan kontrol pemerintahan oleh segelintir elite. Doktrin ini secara definitif mendukung hak-hak dan kekuasaan rakyat kecil dalam perjuangan untuk berkonfrontasi terhadap keuntungan dan keistimewaan yang dimiliki elite.

Terdapat kesulitan memahami makna populisme di kalangan khalayak umum. Sebagai sebuah konsep populisme terkadang dapat bermakna pejoratif. Populisme dalam wacana di ruang publik Indonesia sendiri dipakai dengan arti yang bermacam-macam. Kekaburan makna dalam penggunaan istilah populisme ini memang tidak ketat. Populisme dalam berbagai konteks sangat kompleks dan ruwet. Menurut teoretikus politik Margaret Canovan⁵⁶, Populisme sebelumnya dipakai untuk menjelaskan teknik demokrasi langsung seperti referendum dan kegiatan yang berasal dari inisiatif rakyat (*popular*). Populisme acapkali juga dipakai oleh rezim-rezim diktator. Lanjutnya untuk mendapatkan kejelasan tentang konsep ini dibutuhkan pengategorian sesuai konteks. Corak dan sifat populisme sangat tergantung konteks masing-masing masyarakat. Terdapat kaum populis dalam alam demokrasi, rezim diktator, masyarakat industri maupun pertanian. Populisme juga dapat diidentifikasi perbedaannya berdasarkan negara. Sebagai contoh Rusia, Amerika, Asia, dan Amerika Latin memiliki keunikan terkait

56. Canovan, Margaret. *Populism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), 3.

Fenomena ini. Mendefinisikan populisme merupakan pekerjaan sulit dan akan berujung pada ketidaksepakatan definitif. Pemahaman dan kajian tentang populisme mungkin dan lebih eksplanatif jika dilakukan secara kontekstual.

Margaret Canovan dalam karyanya berjudul *Populism* (1981) berpendapat bahwa istilah populis dipakai sebagai deskripsi diri (*self-description*). Populisme dapat ditandai ketika tokoh atau kelompok melabeli diri sebagai “populis” atau rakyat itu sendiri. Populis tampak sebagai cara menampilkan diri (*self-styled*). Proses dan teknik tersebut dipakai di berbagai macam konteks sosial-politik. Setiap gerakan atau praktik politik di berbagai konteks menyebut diri dan mengklaim bahwa gerakan mereka adalah gerakan dari rakyat biasa, *populist, the people, wong cilik*. Teoritikus sosial dan politik mengkategorikan teknik itu sebagai populisme, meskipun ia dipakai oleh beragam kelompok di beragam konteks dan tradisi pergerakan sosial. Akibatnya tidak terdapat kesatuan pemahaman tentang siapa kaum populis atau apa arti populisme. Ketiadaan kategori dan definisi yang mapan oleh para ilmuwan politik mengakibatkan berbagai macam gerakan sosial dilabeli sebagai populis. Analogi yang cocok menjelaskan fenomena populisme datang dari filsuf dan teoretikus sosial Isaiah Berlin⁵⁷. Populisme menurutnya ibarat sebuah sepatu yang menunggu kaki yang cocok. Banyak sekali kaki yang cocok dan pas sesuai ukuran sepatu itu namun harusnya tidak sampai terperangkap dalam sepatu itu. Seperti seorang pangeran yang selalu menanti kaki siapa yang cocok dengan sepatu tersebut. Analogi tentang sepatu bermakna adanya penantian akan referensi paling murni atau esensi dari populisme.

57. *Ibid.*, 7.

Populisme dengan bentuk dan corak yang bermacam-macam otomatis menghasilkan persepsi berbeda-beda tentangnya. Populisme jika muncul dalam konteks masyarakat demokratik akan dicurigai sebagai diktator dan demagog. Populisme dengan konotasi negatif seperti itu sering dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, mengancam sekaligus merupakan indikasi munculnya rezim diktator. Untuk memahami populisme secara jernih maka konsep ini harus dimaknai dengan terbuka dan fleksibel. Populisme tidak dapat dianggap sebagai ancaman dan musuh demokrasi. Justru sebaliknya populisme seharusnya dimaknai sebagai kekuasaan rakyat (*demos*) atau demokrasi itu sendiri, demokrasi yang radikal⁵⁸. Pemikiran Ernesto Laclau dengan gagasannya demokrasi radikal dalam wacana filsafat dan teori sosial kontemporer dapat dipahami dekat dengan makna populisme ini. Demokrasi radikal versi Laclau bersifat analog dengan makna populisme. Sebagai sebuah proyek intelektual populisme dan demokrasi sama-sama berwatak kerakyatan. Kedua konsep tersebut merupakan visi bagi mobilisasi aksi massa sebagai kaum yang termarjinalkan. Laclau dalam *On Populist Reason* menguraikan bagaimana demokrasi dan populisme tidak bertentangan. Populisme merupakan artikulasi tuntutan politik yang beragam yang muncul sebagai satu bentuk protes politik⁵⁹. Artikulasi aspirasi dalam sistem demokrasi merupakan prasyarat masyarakat demokratik. Demokrasi elektoral merupakan ujung dari aspirasi demi tujuan perbaikan kesejahteraan semua warga dalam hal ini *populi, people, wong cilik*, rakyat. Perjuangan pergerakan massa demi kesejahteraan tidak

58. Ibid., 172.

59. Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London: Verso, 2005), 86.

bisa hanya mengharapkan mobilisasi berbasis kelas semata, melainkan memerlukan penyatuan perjuangan semua kelompok kepentingan dan identitas bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Perjuangan pergerakan massa bertujuan bagi terwujudnya emansipasi maksimal bagi mereka yang kalah karena ketidakadilan sosial yang struktural.

Demokrasi radikal paralel dengan gerakan populisme. Demokrasi radikal bermaksud menjadi fasilitas mengikat solidaritas dan kerja sama bagi ragam identitas dengan maksud memperjelas dan menerangkan ketidakadilan yang selama ini tertutupi. Berbagai kelompok identitas yang mengalami ketidakadilan secara bersama memperjuangkan agenda sosial, yakni kesamaan dan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan⁶⁰. Demokrasi radikal secara mendasar mempunyai kesamaan dengan demokrasi langsung dalam arti kekuasaan rakyat, pemerintahan oleh rakyat tanpa perwakilan elite (*representative democracy*). Dengan kata lain rakyat secara populer mengambil inisiatif jalan langsung, seperti referendum dan menuntut sistem pemerintahan yang lebih demokratik. Demokrasi radikal merupakan demokrasi yang substansial karena betul-betul ditentukan oleh kehendak rakyat⁶¹. Secara definitif demokrasi berarti pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Implikasinya demokrasi dapat dikatakan bersifat analog dengan populisme.

Demokrasi akan jelas dipahami dengan cara memeriksa konsepsi demokrasi yang paling dominan diterima secara luas, yakni demokrasi liberal atau konsepsi demokrasi yang elitis. Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai sistem politik

60. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, (London: Verso, 2005), 198, 167.

61. Canovan, Margaret. *Populism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), 173..

atau yang bekerja di negara-negara industri. Implementasi pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat tidak berkembang. Sebagai konsep demokrasi langsung tidak dijamin oleh banyak ilmuwan politik. Menurut sebagian kelompok ilmuwan menganggap pemerintahan langsung oleh rakyat adalah suatu kemustahilan. Sedangkan lawannya, yakni sistem demokrasi yang “non-demokratik” dianggap bukan demokrasi. Dari sudut pandang demokrasi liberal demokrasi non-demokratik tidak terbuka bagi kompetisi antar banyak partai politik dan organisasi massa. Sehingga ruang politiknya dikuasai oleh satu ideologi dan tidak terbuka bagi keberagaman, kompetisi, kontestasi ideologi dan implementasinya. Kompetisi dan pendulungan suara tidak dibuka bagi publik dan tidak terdapat otonomi individu untuk memutuskan aspirasinya.

Kritik terhadap demokrasi liberal datang akibat adanya ironi kewarganegaraan. Beragam partai tersedia untuk mewakili aspirasi namun masyarakat cenderung apatis dan sehingga kuantitas dan kualitas partisipasinya tidak maksimal dalam kehidupan politik. Masyarakat dalam konteks demokrasi liberal cenderung acuh tak acuh, irasional, sentimental, dan sering bertikai dengan modus politik identitas primordial. Keadaan tersebut justru tidak produktif bagi prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yakni kesadaran kepentingan umum rakyat dan solidaritas sesama rakyat. Demokrasi yang umum demokrasi liberal menurut Margaret Canovan⁶² adalah sistem di mana pemikiran dan kepentingan elite membentuk sekaligus mengatur kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya. Masyarakat hanya berpartisipasi secara minimal dan seakan-akan terlibat

62. Canovan, Margaret. *Populism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), 173..

dalam penentuan kepentingan umum. Persoalan apakah kepentingan dan aspirasi rakyat diwujudkan atau terabaikan masih merupakan sebuah pertanyaan. Kondisi demokrasi kontemporer jauh dari substansinya. Kedaulatan rakyat sesungguhnya akan membuka celah bagi lahirnya kelompok populis dan demagog. Sekelompok orang dengan mudah mengklaim diri mewakili rakyat. Sebagian klaim itu datang segelintir elite yang dalam rekam jejak kerjanya tidak mewakili rakyat. Lantas bagaimana memahami populisme dan segelintir populis dan para demagog. Bagaimana membedakan mereka dari sejatinya rakyat itu sendiri. Bagaimana fenomena populisme mesti dipahami dalam kondisi Indonesia satu dekade ini.

Jan-Werner Muller seorang teoretikus politik dalam karya pendeknya berjudul *What Is Populism?* (2016) menyatakan bahwa populisme bukan bagian otentik dari demokrasi modern. Populisme menurutnya juga bukan fenomena patologis yang lahir dari irasionalitas masyarakat. Populisme hanyalah bayangan permanen (*permanent shadow*) dari politik representasi⁶³. Muller berpendapat bahwa selalu akan ada elite atau tokoh yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat tentang kebaikan bersama (*common good*), klaim sebagai bagian dari rakyat. Apa yang tampak terjadi dalam fenomena populisme belakangan ini tidak lain hanyalah klaim elite bahwa mereka bagian dari rakyat. Otentisitas retorika elite bahwa mereka mewakili rakyat wajib diragukan. Bagi Muller tidak ada populis sejati, yang ada hanya demagog. Kaum populis menurutnya tidak menegasi politik representasi mereka hanya mengklaim, mendaku merekalah satu-satunya wakil rakyat.

63. Jan-Werner Müller. *What is Populism?* (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2018).

Kaum populis cenderung anti-pluralisme karena klaim mereka sebagai wakil rakyat yang tunggal. Populis selalu menegasi lawan politiknya dan mengampanyekan oposisi sebagai bukan rakyat (*people*). Ketika sebagian rakyat tidak mendukung mereka lantas akan dilabeli bukan bagian dari rakyat. Kaum populis selalu bermain wacana untuk mendelegitimasi lawan politik sebagai elite yang tidak bermoral. Moralitas ada di tangan rakyat yang homogen yang infalibilis. Klaim-klaim tentang dan pengatasan namaan rakyat hanya merupakan retorika politik. Populisme bukanlah jalan yang baik dalam konteks partisipasi politik karena klaim-klaim tentang rakyat sering dieksploitasi berlebihan.

Kelompok populis harus dikritisi, diperhadapkan dengan wacana tandingan tentang kebijakan, program, pandangan moral, dan legitimasi politiknya. Populisme tidak dapat dianggap sebagai bentuk koreksi atas demokrasi liberal karena yang dilakukan cenderung hanyalah klaim semata. Namun demikian, menurut Muller populisme punya kegunaan tertentu, yakni untuk menunjukkan bahwa selalu ada eksistensi rakyat (*people*) yang tidak terwakilkan aspirasi dan kepentingannya⁶⁴. Fenomena populisme jika digunakan sebagai alat politik emansipatoris sangat potensial dan efektif untuk mendesak, mendorong para pembela demokrasi liberal menyadari kegagalan sistem demokrasi representasi yang mendaku wakil rakyat. Populisme menjadi katalisator diskursus kerakyatan. Fenomena populisme mendorong semua elemen masyarakat dan kelompok dari berbagai kutub ideologi untuk mempertanyakan lagi berbagai konsep

64. Ibid.

moralitas sosial seperti kebebasan, keadilan, hak, dan lain sebagainya.

Salah satu filsuf besar yang memberi perhatiannya terhadap fenomena populisme adalah Michael Sandel. Dalam artikel berjudul *Populism, Liberalism, Democracy* (2018) Michael Sandel menelisik secara tajam fenomena populisme kanan. Sandel memeriksa anatomi populisme kanan yang marak dalam politik kontemporer secara global. Sandel menyatakan bahwa fenomena populisme yang terjadi di beberapa negara Eropa, Brexit dan terpilihnya Donald Trump merupakan akibat dari meningkatnya ketidaksetaraan dan globalisasi yang hanya menguntungkan segelintir elite (*the few*) yang ada puncak penguasaan ekonomi⁶⁵. Keuntungan dari kekuasaan dan monopoli yang begitu besar menyusahkan rakyat biasa yang semakin termarjinal dan merasa tidak berdaya. Populisme kanan merupakan akibat dari kemarahan atas pendekatan teknokratis terhadap politik yang seakan tuli dalam mendengar aspirasi rakyat yang merasa tertinggal secara budaya dan ekonomi.

Populisme kanan menurut Sandel merupakan simtom dari kegagalan politik progresif. Kebangkitan populisme kanan yang terjadi di Eropa US dan UK merupakan tamparan bagi politik dari partai-partai arus utama berideologi liberal, tengah kiri, partai sosialis Perancis dan partai buruh Inggris karena gagal mewakili agenda progresif. Populisme kanan menurut Sandel mengambil alih dan menggantikan peran yang harusnya dimainkan oleh partai-partai dengan agenda progresif. Kelompok progresif haruslah memulai memikirkan kembali misi dan tujuannya.

65. Michael J. Sandel, *Populism, Liberalism, Democracy*, *Sage Journal Philosophy and Social Criticism* 44, No 4. (March 2018): 354.

Agenda progresif bertugas menangkal populisme kanan yang sentimental, xenofobia, nasionalisme sempit dan terkadang chauvistik. Jalan menangkal populisme kanan dimulai dengan cara memperhatikan dan mengenali secara mendasar sebab ketidakpuasan, kemarahan, protes masyarakat dan tuntutan-tuntutan rakyat kecil (*ordinary people*).

Sandel menyebutkan lebih lanjut bahwa aspirasi dan tuntutan rakyat kecil bukan hanya bagian dari persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Kemarahan dan protes bukan hanya persoalan terkait upah dan pekerjaan melainkan juga penilaian sosial (*social esteem*) yang tentu bersifat sosial-budaya. Untuk mengatasi persoalan tersebut bagi Sandel diperlukan apa yang disebutnya sebagai revitalisasi ruang publik. Sandel mengkritisi ruang publik liberal yang mandul. Menurutnya tidak ada netralitas dalam ruang publik liberal. Netralitas dan keragaman aspirasi dan hak dalam ruang publik liberal adalah sebuah ilusi. Nalar publik liberalisme secara moral tidaklah netral dalam tujuan mencapai prinsip-prinsip keadilan. Di sisi lain logika pasar bebas (*laissez faire*) telah mendominasi nalar publik liberal sendiri⁶⁶. Nalar publik liberal telah terdistorsi penuh oleh logika pasar bebas yang motifnya bias kepentingan dan keuntungan pribadi. Pasar bagi Sandel bukanlah instrumen moral yang baik dalam menentukan kebaikan publik (*common good*). Kelemahan logika ekonomi liberal dan liberalisme secara prinsipil (moral) mengakibatkan ruang publik menjadi nihil makna. Ruang kosong pemaknaan dan kepentingan umum tersebut akhirnya dibajak oleh populisme kanan yang cenderung sempit, intoleran, otoritarian. Sifat-sifat buruk populisme

66. Ibid., 359..

kanan muncul dalam bentuk fundamentalisme religius dan nasionalisme sempit yang mudah disaksikan beberapa tahun terakhir.

Populisme secara umum merupakan dampak kegagalan mewujudkan kesejahteraan (*welfare*). Terjadi akumulasi kapital yang menghasilkan gap lebar antara kelas kapitalis dan rakyat biasa. Demokrasi substansial, distribusi ekonomi dan keadilan sosial dalam rezim neoliberal tidak terwujud. Pemerintahan yang terjungkiti neoliberalisme gagal menjamin keadilan, kesetaraan, kebaikan umum. Mobilitas kelas sosial semakin sulit terjadi bahkan hampir dapat dikatakan mustahil. Kemungkinan bagi kelas pekerja dan kelas tengah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dengan standar lebih baik semakin sulit diwujudkan. Janji-janji modernitas tentang terwujudnya kebaikan bagi umat manusia tampak mandeg sehingga membutuhkan evaluasi ulang klaim moral dari modernitas. Populisme sebagai konsep dan fenomena yang akhir-akhir ini muncul di masyarakat menjadi satu bahan refleksi bagaimana untuk menghasilkan perjuangan sosial politik alternatif. Populisme bisa diutilisasi menjadi sebuah tantangan, ujian, dan tuntutan pertanggungjawaban kepada elite yang mengaku mewakili rakyat, yang pada kenyataan rakyat kecil itu sendiri yang terus-menerus dieksploitasi, dipinggirkan, direpresi.

Populisme sebagai konsep yang netral bisa diklaim oleh berbagai agen dari berbagai spektrum ideologi. Konteks populisme kontemporer dapat dibedakan secara sederhana. Populisme dengan ideologi kanan bercorak xenofobik dan secara terang menyerang elite dan identitas lain di luar kategori mereka. Populisme kanan terkenal dengan sifatnya yang xenofobik, rasis, dan chauvinistik. Populisme kiri di lain pihak

cenderung hanya menyerang kelompok elite dan kapitalis yang dianggap merupakan pelaku dan penyebab ketidakadilan. Populisme sebagai fenomena politik cenderung muncul dari ketidakpuasan atas struktur dan sistem politik yang ada. Mobilisasi massa dan gerakan sosial berbasis rakyat bermaksud untuk mengganti demokrasi representatif yang dituduh korup dengan demokrasi rakyat. Populisme jika tidak dikritisi dalam kondisi tertentu bisa muncul dengan wujud mobokrasi.